



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KINERJA UTAMA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NAMA : MURTONO, S.STP, M.Si
N I P : 19780503 199702 1 002
N D H : 05

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

RINGKASAN

perwujudan sasaran strategis Kementerian Negara/Lembaga (K/L) merupakan keberhasilan dari perencanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun jangka menengah. Demikian halnya keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, tentunya harus dapat diukur dari pencapaian target-target dari kinerja program dan kegiatan yang telah disusun dalam proses perencanaan.

Berdasarkan kondisi tersebut dan memperhatikan kewenangan dalam lingkup tugas dan fungsi yang dimiliki Penulis selaku Kepala Bagian Perencanaan Program, penulis mengidentifikasi kesenjangan informasi kinerja program dan kegiatan diantara kondisi ideal dan kondisi kenyataan yang bersifat strategis dan memerlukan suatu terobosan inovasi untuk menuju kondisi peningkatan kualitas perencanaan, melalui Proyek Perubahan "Pembangunan Sistem Informasi Kinerja Utama Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri".

Proyek Perubahan Penulis dengan tema "Pembangunan Sistem Informasi Kinerja Utama Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri", dapat dilaksanakan dengan ketercapaian output jangka pendek, yaitu:

1. Pedoman Penyusunan Informasi Kinerja Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Informasi Kinerja Utama (Program dan Kegiatan) 12 Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.

Inovasi dalam Proyek Perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan terutama dari para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang difokuskan membangun sistem informasi kinerja utama program dan kegiatan tahunan secara komprehensi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri, dengan area intervensi aspek kebijakan, sistem dan prosedur, serta sarana dan prasarana.